KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penanganan Bencana, DPR Dorong Perppu
Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Penanganan Bencana, DPR Dorong Perppu

JAKARTA-DPR mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mempercepat penanggulangan bencana di tanah air.

"Tim Pengawas DPR menganggap perlu penerbitan Perppu terkait penanggulan bencana untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan dampak bencana," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat rapat koordinasi Tim Pengawas Bencana DPR dengan sejumlah kementerian, lembaga, kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/3).

Rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPR itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian PMK, sejumlah DPRD dan kepala daerah.

Menurut Fahri, Undang-Undang Penanggulangan Bencana terdaftar sebagai Undang-Undang Nomor 24/2007. Perppu diperlukan untuk mempercepat penanggulangan bencana.

Dalam rapat, Fahri Hamzah sempat menyinggung sejumlah keluhan dari para korban bencana, salah satunya yakni, penyaluran santunan dari pemerintah pusat.

"Karena itu, kami meminta pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan hidup, maupun santunan lainnya bagi warga yang belum tuntas tersebut," katanya.

Fahri meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan program salah satunya BPJS subsidi dan jaringan pengamanan sosial lainnya. Ia ingin data tersebut disesuaikan dengan data korban gempa.

"Untuk merespons beberapa temuan tersebut, maka pada rapat kerja hari ini, kita ingin fokus agar pihak pemerintah menjawab beberapa isu itu," katanya.

Dia juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi sistem pembiayaan kendaraan penanganan bencana.

Selain itu, Fahri juga meminta BNPB, menyampaikan rencana realisasi lanjutan untuk dana stimulan bantuan pembangunan rumah, termasuk rencana pembiayaan pembangunan fasilitas publik pada daerah terampak gempa, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami berharap BNPB menyampaikan proses pemutakhiran data gempanisasi untuk penerima bantuan stimulan pembangunan rumah. Juga evaluasi kelembagaan penanganan bencana yang menggunakan struktur ad hoc," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, pihaknya sudah menerima dana Rp1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp1,8 triliun. Sebab, ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

"Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransfer. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang," kata Najmu. (aen)

HASIL RAPAT PENANGANAN BENCANA

Sumber : Kesimpulan rapat koordinasi Tim Pengawas Bencana DPR RI bersama sejumlah kementerian, lembaga, kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan



1. Pemerintah didorong menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Penanggulangan Bencana.
2. Tim Pengawas DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB sehingga pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dapat segera diselesaikan dengan memperhatikan aspek kesehatan.
3. Tim Pengawas DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan validasi dan verifikasi data penerima dana stimulan berdasarkan usulan terbaru dari pemerintah daerah beserta penyederhanaan persyaratan pembangunan rumah.
4. Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima program PKH, PBI, JKN, dan program jaring pengaman sosial lainnya sehingga korban bencana yang berhak dapat mengakses seluruh program bantuan sosial yang dimaksud.
5. Tim Pengawas DPR RI meminta pemerintah memperbanyak lembaga keuangan (bank) selain BRI dan meminta agar bank tidak menjadi lembaga verifikasi.

ANGGA GUMELAR/INDOPOS